



PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA GURU DI SMP NEGERI 5 KOTA TASIKMALAYA

Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Pendidikan
STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Kiki Hartati
e-mail: kikihartati153@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kendala transformasi pendidikan, termasuk rendahnya penguasaan teknik pembelajaran berbasis proyek, keterbatasan sarana, serta resistensi dalam mengadopsi metode pengajaran baru. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan kurikulum dan kompetensi terhadap kinerja guru di SMP Negeri Lima Kota Tasikmalaya melalui pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum dan kompetensi guru berada pada kategori sangat baik serta terintegrasi secara fungsional dengan nilai lokal dan dukungan teknologi yang memadai. Secara parsial, kebijakan kurikulum terbukti menjadi instrumen penggerak utama yang memberikan landasan operasional jelas, sementara kompetensi guru menjadi modal internal krusial dalam menghasilkan interaksi edukatif yang berkualitas. Secara simultan, kombinasi antara sistem kebijakan yang terstruktur dan kualitas individu guru memberikan pengaruh yang sangat kuat dan dominan terhadap peningkatan kinerja guru. Sinergi kedua variabel tersebut menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan produktivitas tenaga pendidik dan efektivitas organisasi sekolah, sedangkan faktor lain di luar penelitian ini tetap memberikan kontribusi kecil terhadap capaian kinerja secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kebijakan Kurikulum, Kompetensi Guru, Kinerja Guru, Kurikulum Merdeka.

Abstract

This research is driven by various obstacles in educational transformation, including low mastery of project-based learning techniques, limited facilities, and resistance to adopting new teaching methods. The objective of the study is to analyze the influence of curriculum policy implementation and teacher competence on teacher performance at SMP Negeri 5 Tasikmalaya City using a quantitative approach. The results reveal that both curriculum policy implementation and teacher competence are in the "excellent" category and are functionally integrated with local values and



adequate technological support. Partially, curriculum policy proved to be the primary driving instrument providing a clear operational foundation, while teacher competence serves as a crucial internal asset in producing high-quality educational interactions. Simultaneously, the combination of a structured policy system and individual teacher quality exerts a very strong and dominant influence on enhancing teacher performance. The synergy between these two variables is the key to optimizing educator productivity and school organizational effectiveness, while other factors outside this study provide a minor contribution to overall performance achievements.

Keywords: Curriculum Policy, Teacher Competence, Teacher Performance, Merdeka Curriculum.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia secara tegas telah memprioritaskan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan sebagai prioritas utama dan fondasi krusial bagi kemajuan bangsa, sebuah komitmen yang terperinci dalam berbagai produk hukum terbaru. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang berfungsi sebagai payung hukum fundamental untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara guna memperoleh akses pendidikan yang bermutu. Sebagaimana ditegaskan oleh Tilaar (2012), pendidikan nasional harus mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh dan berkeadilan.

Amanat konstitusi dan Undang-undang Sisdiknas di atas senantiasa diperkuat dan diremajakan melalui serangkaian regulasi turunan yang bersifat dinamis, termasuk berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek). Pembaharuan regulasi ini sangat penting guna mengakomodasi dan menyesuaikan sistem pendidikan agar relevan dengan tuntutan serta dinamika perubahan zaman yang sangat cepat, khususnya dalam menghadapi era digital. Mulyasa (2021) berpendapat bahwa perubahan kurikulum merupakan keniscayaan untuk menjawab tantangan global dan memastikan bahwa output pendidikan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah secara progresif.

Kebijakan terbaru mengenai dunia pendidikan di Indonesia berkaitan dengan Kurikulum Merdeka, yang merefleksikan upaya adaptif pemerintah untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya menguasai pengetahuan tetapi juga memiliki keterampilan abad ke-21. Implementasi Kurikulum Merdeka untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah menjadi kebijakan sentral yang mengubah paradigma pembelajaran dari konten yang padat menjadi pembelajaran yang mendalam, relevan, dan fleksibel. Menurut studi yang dilakukan oleh Rahayu dkk. (2022) dalam jurnal pendidikan, Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi



pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik secara mandiri.

Penerapan Kurikulum Merdeka di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat ini diatur secara resmi melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 yang mengedepankan pembentukan karakter. Kurikulum ini secara fundamental menggeser fokus pendidikan dari sekadar transfer materi akademik menjadi pembentukan karakter yang holistik melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai inti dari proses pembelajaran. Syafi'i (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa P5 merupakan instrumen strategis untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada siswa melalui kegiatan nyata yang bersifat lintas disiplin ilmu dan berbasis pada pemecahan masalah di lingkungan sekitar.

Perubahan paradigma kurikulum ini menuntut penyesuaian yang signifikan dan masif di seluruh ekosistem pendidikan, yang tidak hanya terbatas pada penyusunan dokumen perencanaan baru, tetapi juga reformasi metode pengajaran. Dalam konteks ini, peran guru menjadi semakin krusial karena mereka bertransformasi dari penyampai ilmu menjadi fasilitator pembelajaran yang berpusat sepenuhnya pada siswa (*student-centered learning*). Sejalan dengan pendapat Daryanto (2014), guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna agar siswa dapat mengeksplorasi potensi dirinya secara optimal tanpa merasa tertekan oleh beban materi yang terlalu kaku dan bersifat administratif semata.

Peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan tugasnya merupakan sebuah keniscayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai tenaga profesional yang memiliki kualifikasi akademik. Undang-undang ini secara fundamental mengakui guru sebagai profesi yang memerlukan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik untuk menjamin mutu pendidikan nasional yang berkelanjutan. Suprihatiningrum (2013) menyatakan bahwa profesionalisme guru bukan hanya dilihat dari sertifikat yang dimiliki, melainkan dari efektivitasnya dalam menjalankan proses pembelajaran serta tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara formal oleh negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru merupakan kebijakan yang menyempurnakan ketentuan spesifik mengenai beban kerja dan tunjangan profesi guru. Peraturan ini memperkenalkan perubahan fundamental terkait tata kelola guru, seperti penyesuaian tugas pokok Kepala Sekolah yang kini tidak lagi diwajibkan untuk melakukan kegiatan mengajar di kelas secara rutin. Hamzah (2018) menekankan bahwa regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga mereka dapat fokus pada peningkatan kualitas pengajaran tanpa terbebani oleh ketidakpastian administratif yang sering terjadi di masa lalu.



Pengelolaan kinerja guru selanjutnya diatur berdasarkan Perdirjen GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 yang bertujuan mengoptimalkan kinerja guru agar selaras dengan transformasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di setiap satuan pendidikan. Dasar penetapan ini adalah kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan kinerja pegawai yang terukur dan objektif sesuai dengan standar reformasi birokrasi yang sedang dijalankan secara nasional. Penelitian oleh Sari (2023) dalam jurnal manajemen pendidikan menunjukkan bahwa sinkronisasi antara perencanaan kinerja dengan praktik di kelas sangat menentukan tingkat keberhasilan implementasi kurikulum baru yang sedang digulirkan oleh pemerintah saat ini.

Tujuan inti dari pengelolaan kinerja Guru dan Kepala Sekolah yang diatur dalam Perdirjen ini adalah untuk mencapai sasaran kinerja satuan pendidikan melalui penguatan kolaborasi antar pemangku kebijakan. Hal ini diwujudkan melalui tiga pilar utama: peningkatan kualitas guru, penguatan peran Kepala Sekolah, serta kolaborasi yang solid antar seluruh warga sekolah untuk menciptakan ekosistem belajar yang kondusif. Menurut Sagala (2013), manajemen kinerja yang efektif di sekolah harus mampu mengintegrasikan kepentingan individu guru dengan tujuan organisasi sekolah agar tercipta sinergi yang berdampak langsung pada peningkatan prestasi akademik siswa secara keseluruhan.

Pengelolaan kinerja yang baru ini memiliki orientasi yang jelas dan transformatif, di mana fokus utamanya adalah mewujudkan pembelajaran yang berkualitas tinggi bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Proses ini didorong oleh dialog kinerja yang intens antara Kepala Sekolah dan Guru untuk memastikan bahwa ekspektasi kinerja dapat dipenuhi melalui pengembangan kompetensi yang relevan dan berkelanjutan. Wijaya (2022) berpendapat bahwa dialog kinerja merupakan kunci dalam transparansi penilaian, di mana guru diberikan kesempatan untuk merefleksikan praktiknya dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari pimpinan sekolah untuk perbaikan di masa depan.

Secara praktis, peraturan tersebut menjadi pedoman wajib bagi Guru dan instansi terkait dalam melaksanakan siklus pengelolaan kinerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi akhir tahun secara sistematis. Manfaatnya adalah memfasilitasi pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, memberikan pengakuan atas kontribusi, serta mendukung peningkatan karier berdasarkan kualitas kinerja yang terbukti melalui data otentik di lapangan. Sebagaimana dinyatakan oleh Sedarmayanti (2017), sistem penilaian kinerja yang baik haruslah memenuhi asas keadilan dan objektivitas, sehingga mampu memotivasi pegawai untuk memberikan performa terbaiknya secara konsisten dalam jangka waktu panjang.

Guru sebagai pendidik profesional menduduki posisi strategis dalam merealisasikan visi pembelajaran bermutu, sehingga menuntut penguasaan kompetensi holistik yang mencakup aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional secara seimbang. Kompetensi pedagogik khususnya menjadi sorotan utama karena berkaitan langsung dengan kemampuan guru dalam mengelola kelas



dan memahami karakteristik psikologis peserta didik yang beragam dalam satu ruang belajar. Sudjana (2016) menegaskan bahwa guru yang kompeten adalah guru yang mampu mengorganisasikan materi pelajaran menjadi pengalaman belajar yang menantang sekaligus mampu menginspirasi siswa untuk terus belajar secara mandiri sepanjang hayat mereka.

Tugas pokok guru telah diatur secara komprehensif, mencakup tanggung jawab vital untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi seluruh peserta didik pada jalur pendidikan formal secara terstruktur. Tugas mulia ini harus dilaksanakan secara konsisten mulai dari tingkat usia dini hingga menengah, agar peran guru tidak hanya sekadar mentransfer ilmu tetapi juga membentuk karakter siswa. Mulyasa (2013) menyebutkan bahwa efektivitas tugas guru sangat bergantung pada dedikasi dan integritas pribadi dalam menjalankan peran sebagai pengganti orang tua di sekolah demi keberhasilan masa depan anak bangsa.

Lingkup tugas utama guru diimplementasikan melalui kegiatan pokok yang terstruktur dalam beban kerja harian, dengan fungsi utama merencanakan pembelajaran yang selaras dengan kurikulum nasional dan kebutuhan spesifik siswa. Beban kerja minimal 24 jam tatap muka merupakan standar dedikasi yang harus dipenuhi untuk memastikan interaksi edukatif antara guru dan siswa terjadi secara maksimal dan berkualitas di dalam kelas. Kunandar (2015) menyatakan bahwa perencanaan yang matang merupakan setengah dari keberhasilan pembelajaran, sehingga guru wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif dan kreatif setiap semesternya.

Fungsi penting lainnya adalah menilai hasil pembelajaran sebagai proses untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi peserta didik dan menjadi basis bagi perbaikan proses pembelajaran di masa mendatang secara berkesinambungan. Selain itu, guru juga memegang peran dalam membimbing siswa melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang relevan dengan pengembangan minat dan bakat unik yang dimiliki oleh setiap individu siswa di sekolah. Arifin (2012) berpendapat bahwa evaluasi pendidikan tidak boleh hanya terpaku pada angka, melainkan harus mampu menggambarkan perkembangan perilaku dan cara berpikir siswa sebagai hasil dari proses pendidikan yang mereka jalani.

Seorang guru profesional memiliki tuntutan berkelanjutan untuk mengembangkan diri seiring dengan perkembangan zaman melalui program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang didukung oleh pemberian tunjangan profesi sebagai bentuk apresiasi pemerintah. Di luar tugas inti, guru juga dapat mengemban tugas tambahan seperti menjadi wakil kepala sekolah atau kepala laboratorium yang secara resmi diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja. Menurut penelitian Hidayat (2021), tunjangan profesi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi guru untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran, meskipun efektivitasnya masih perlu terus dipantau melalui sistem penilaian kinerja yang lebih ketat.



Guru memikul tanggung jawab besar dalam tata kelola pendidikan nasional, termasuk kewajiban memenuhi kualifikasi akademik strata satu (S1) dan memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) sebagai identitas resmi pendidik profesional. Komitmen waktu dan penugasan, terutama di daerah khusus, menunjukkan betapa pentingnya pemerataan kualitas pendidikan agar tidak terjadi kesenjangan prestasi antara siswa di perkotaan dengan siswa di wilayah pelosok. Musfah (2015) menekankan bahwa distribusi guru yang merata merupakan kunci dari keadilan sosial dalam pendidikan, sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengajaran dari guru yang kompeten.

Kompetensi profesional guru saat ini mengalami penekanan baru, di mana penguasaan materi harus disertai kemampuan mengaitkannya dengan isu kontemporer melalui pembelajaran berbasis masalah atau proyek yang menjadi ciri Kurikulum Merdeka. Guru tidak hanya dituntut menguasai teori, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan literasi dan numerasi ke dalam setiap mata pelajaran agar siswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Syahputra (2020) dalam artikel jurnalnya menyatakan bahwa tantangan guru di era 4.0 adalah bagaimana mengubah informasi yang melimpah menjadi pengetahuan yang berguna melalui proses pembelajaran yang kritis, analitis, dan kolaboratif di dalam kelas.

Kompetensi kepribadian dan sosial guru tetap menjadi pilar fundamental yang memastikan guru menjadi teladan (*ing ngarsa sung tulada*) dengan integritas moral tinggi dalam berinteraksi dengan seluruh warga sekolah. Dalam implementasi kurikulum baru, kompetensi kepribadian menjadi sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila kepada siswa melalui keteladanan nyata yang ditunjukkan oleh guru setiap hari di lingkungan sekolah. Pidarta (2011) menjelaskan bahwa kepribadian guru merupakan alat pendidikan yang paling ampuh, karena siswa lebih mudah meniru apa yang dilakukan oleh gurunya daripada apa yang hanya diucapkan secara lisan tanpa bukti.

Terdapat kaitan yang erat dan timbal balik antara kompetensi guru dengan kinerja guru; kompetensi yang tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai kinerja yang optimal dalam proses pembelajaran secara efektif. Guru yang kompeten cenderung lebih percaya diri dalam mengelola kelas, menggunakan media yang variatif, serta melakukan penilaian yang akurat, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Riset oleh Supardi (2014) membuktikan bahwa variabel kompetensi memiliki kontribusi yang sangat dominan terhadap kinerja guru, sehingga program pengembangan SDM di sekolah harus difokuskan pada peningkatan aspek-aspek kompetensi inti pendidik.

Berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka, kinerja guru kini didefinisikan secara lebih luas mencakup kemampuan adaptasi, partisipasi aktif dalam komunitas belajar, serta inisiatif melakukan refleksi atas praktik baik yang dilakukan. Regulasi terbaru mendorong transparansi melalui platform digital seperti PMM (Platform Merdeka Mengajar), di mana guru dituntut mendokumentasikan bukti karya yang mencerminkan kinerja berbasis bukti atau *evidence-based performance*. Sulisworo (2023) dalam jurnal inovasi pendidikan berpendapat bahwa



penggunaan teknologi dalam manajemen kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas guru sekaligus mempermudah proses pemantauan kemajuan pembelajaran oleh pihak otoritas pendidikan terkait.

Namun dalam ranah implementasi di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya, sering muncul permasalahan terkait kesenjangan kompetensi pedagogik guru, terutama dalam merancang dan memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek (P5) yang masih baru. Berdasarkan pengamatan sementara, ditemukan fenomena rendahnya kemampuan guru dalam menyusun modul ajar yang sesuai standar kurikulum baru, serta kecenderungan masih menggunakan metode ceramah konvensional yang kurang melibatkan aktivitas siswa secara aktif. Isu ini sejalan dengan temuan dalam jurnal pendidikan yang menyebutkan bahwa resistensi terhadap perubahan kurikulum seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam mengenai filosofi dan teknis pelaksanaan kebijakan baru di tingkat operasional.

Kinerja guru yang belum maksimal di lokasi penelitian diduga kuat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan kurikulum yang belum merata serta tingkat kompetensi guru yang perlu terus ditingkatkan secara intensif. Masalah-masalah seperti keterbatasan sarana digital, beban administrasi yang dirasa berat, serta kurangnya kolaborasi antar guru dalam forum MGMP menjadi hambatan nyata yang perlu segera dicarikan solusinya melalui penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melakukan studi mendalam dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Kurikulum dan Kompetensi Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya” untuk memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kualitas pendidikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan kurikulum (X1) dan kompetensi guru (X2) terhadap kinerja guru (Y). Lokasi penelitian ditetapkan di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya dengan melibatkan seluruh tenaga pendidik sebagai populasi penelitian. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, yaitu sebanyak 63 orang, peneliti menggunakan teknik *total sampling* atau sensus, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel (responden) guna mendapatkan gambaran data yang komprehensif, kecuali Kepala Sekolah yang diposisikan sebagai informan kunci melalui teknik wawancara.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang mencakup observasi, wawancara, serta penyebaran angket dengan Skala Likert lima tingkat. Teknik analisis data diawali dengan mentransformasi data ordinal menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI) agar memenuhi syarat analisis statistik parametrik. Selanjutnya, dilakukan uji validitas melalui korelasi *Product Moment* dan uji reliabilitas dengan *Alpha Cronbach*. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menerapkan model analisis regresi linear berganda dan koefisien determinasi guna mengukur besarnya pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya merupakan institusi pendidikan jenjang menengah pertama dengan status negeri yang berlokasi strategis di pusat Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Sekolah ini telah berdiri sejak tahun 2004 dan saat ini memegang sertifikasi ISO 9001:2008, yang menunjukkan komitmennya terhadap standar manajemen mutu. SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya menerapkan sistem pembelajaran Full Day School (5 hari kerja) dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai, termasuk akses internet sebesar 100 Mb. Selain itu, sekolah ini aktif dalam program Pemerintah melalui penerimaan dana BOS dan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

1. Sumber Daya Manusia (Guru dan Staf)

Berdasarkan data tenaga pendidik dan kependidikan, SMP Negeri 5 Tasikmalaya memiliki kekuatan SDM yang cukup besar dengan total 63 personil.

a. Jumlah Guru (Pendidik)

Terdapat total 52 tenaga pendidik yang terdiri dari:

- Guru PNS/PPP

Mayoritas guru sudah berstatus ASN, memberikan stabilitas dalam pengajaran.

- Guru Honor Sekolah

Terdapat beberapa guru honorer untuk mendukung mata pelajaran spesifik seperti Informatika dan Matematika.

- Kualifikasi Pendidikan

Didominasi oleh lulusan S1, dengan jumlah yang signifikan telah menempuh jenjang S2 (Magister).

b. Tenaga Administrasi (Staf/Tenaga Kependidikan)

Terdapat total 11 tenaga kependidikan (staf administrasi dan teknis), yang bertanggung jawab atas:

- Manajemen IT dan Data (Operator/S.Kom).
- Administrasi Keuangan dan Bendahara BOS.
- Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
- Layanan Umum dan Keperawatan/UKS.

2. Sarana, Prasarana, dan Sanitasi

Sekolah ini memiliki fasilitas penunjang yang terus dikembangkan, meskipun beberapa aspek sanitasi masih memerlukan peningkatan sesuai standar terbaru.

- Ruang Kelas dan Rombongan Belajar



Mengacu pada beban mengajar guru yang mencapai 33-36 jam per minggu dan total distribusi siswa pada beberapa guru bimbingan (mencapai rata-rata 350-400 siswa per konselor), menunjukkan jumlah rombongan belajar yang besar dan padat.

- Fasilitas Listrik & Internet
Sangat memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis IT.
- Sanitasi:
Sumber air bersih menggunakan Ledeng/PAM dengan jumlah yang cukup.

B. Pembahasan

Pengujian hipotesis untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi kebijakan kurikulum dan Kompetensi terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya dilakukan melalui analisis regresi linear berganda. Metode ini dipilih karena mampu mengukur hubungan antara satu variabel terikat (*dependent variable*), yaitu kinerja guru, dengan dua variabel bebas (*independent variables*) secara simultan. Dalam prosesnya, analisis ini akan menghasilkan koefisien determinasi (R^2) yang menunjukkan seberapa besar persentase variasi kinerja guru dapat dijelaskan oleh kebijakan kurikulum dan kompetensi, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Selain mengukur pengaruh secara kolektif, regresi berganda juga memungkinkan peneliti melakukan uji signifikansi parsial (Uji t) dan uji simultan (Uji F). Uji t digunakan untuk membuktikan apakah masing-masing variabel, baik kebijakan kurikulum maupun kompetensi, memiliki kontribusi yang signifikan secara individu terhadap kinerja guru di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Sementara itu, Uji F dilakukan untuk memastikan bahwa kombinasi dari kedua variabel tersebut memang memiliki dampak yang nyata secara bersama-sama. Berikut hasil pengujian data melalui regresi berganda dari hasil tanggapan responden.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.897 ^a	.804	.797	2.614319

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Guru, Implementasi Kebijakan Kurikulum

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,897 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel Kompetensi Guru dan implementasi kebijakan kurikulum terhadap variabel dependennya. Sementara itu, nilai R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,804 menjelaskan bahwa variabel Kompetensi Guru dan implementasi kebijakan kurikulum secara simultan memberikan kontribusi sebesar 80,4% terhadap perubahan variabel dependen, hal tersebut mengindikasikan bahwa model tersebut memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

Selanjutnya, nilai Adjusted R Square sebesar 0,797 memberikan gambaran kontribusi yang lebih akurat karena telah disesuaikan dengan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan, yang tetap berada pada level sangat tinggi (sekitar 79,7%). Di sisi lain, nilai Standard Error of the Estimate sebesar 2,614319 berfungsi sebagai ukuran keakuratan prediksi. Semakin kecil angka ini dibandingkan dengan standar deviasi variabel dependen, maka semakin akurat model regresi tersebut dalam memprediksi data yang sebenarnya.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1655.084	2	827.542	121.080	.000 ^b
	Residual	403.245	59	6.835		
	Total	2058.329	61			

a. Dependent Variable: Kinerja Guru SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Guru, Implementasi Kebijakan Kurikulum

Berdasarkan tabel ANOVA yang disajikan, diketahui bahwa model regresi memiliki nilai Sum of Squares sebesar 1655.084 dengan derajat bebas (df) sebesar 2 untuk variabel prediktor, hal tersebut menunjukkan bahwa variasi kinerja guru di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya sebagian besar dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel implementasi kebijakan kurikulum dan Kompetensi Guru. Dengan nilai Mean Square regresi yang mencapai 827.542 dibandingkan dengan Mean Square residual yang hanya 6.835, terlihat adanya kontribusi yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependennya.

Pengujian secara simultan (Uji F) menghasilkan nilai F-hitung sebesar 121.080. Angka ini jauh lebih besar daripada nilai F-tabel pada umumnya untuk tingkat signifikansi 5%, hal tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan kurikulum dan Kompetensi Guru secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat kuat dan nyata terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Model ini terbukti fit atau layak digunakan untuk memprediksi sejauh mana kebijakan dan kompetensi mampu meningkatkan efektivitas kerja para pendidik di sekolah tersebut.

Hasil yang paling penting ditunjukkan oleh kolom Sig. (Signifikansi) dengan nilai .000. Karena nilai signifikansi ini jauh lebih kecil dari taraf nyata 0.05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh tersebut bersifat signifikan secara statistik. Secara praktis, temuan ini memberikan bukti empiris bahwa setiap peningkatan kualitas dalam penerapan kurikulum dan pengembangan kompetensi guru secara otomatis akan membawa dampak positif yang nyata terhadap peningkatan kinerja guru di lingkungan SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya.

Selanjutnya untuk mengetahui besar pengaruh dari setiap variabel dalam penelitian ini, yaitu besarnya pengaruh implementasi kebijakan kurikulum terhadap kinerja Guru di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya, dan besarnya pengaruh kompetensi terhadap kinerja Guru di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya, dilakukan melalui analisis jalur (*path analysis*), dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengaruh Implementasi Kebijakan (X_1) terhadap Kinerja Guru (Y)

Formulasi untuk mengetahui pengaruh ini didasarkan pada nilai koefisien jalur (*path coefficient*) yang diambil dari kolom *Standardized Coefficients* Beta. Dalam data tersebut, pengaruh langsung implementasi kebijakan kurikulum (X_1) terhadap Kinerja Guru (Y) dinyatakan dengan simbol ρ_{YX_1} . Rumus untuk menghitung kontribusinya adalah kuadrat dari koefisien beta tersebut, yaitu $\rho_{YX_1} \times \rho_{YX_1}$ ($0,513 \times 0,513 = 0,263$ atau 26,3%).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya dengan nilai t hitung sebesar 5,926 dan signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Secara total, pengaruh X_1 terhadap Y (gabungan pengaruh langsung dan tidak langsung melalui variabel Kompetensi) mencapai 0,434 atau 43,4%, hal tersebut menandakan bahwa kebijakan kurikulum merupakan instrumen penggerak utama dalam menentukan kualitas kerja guru di sekolah tersebut.

Kesimpulannya, implementasi kebijakan kurikulum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Guru. Semakin efektif kebijakan kurikulum diimplementasikan secara terstruktur di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya, maka akan semakin tinggi pula pencapaian kinerja para gurunya. Kebijakan ini menjadi fondasi yang memberikan arah kerja yang jelas bagi guru.

2. Pengaruh Kompetensi (X_2) terhadap Kinerja Guru (Y)

Formulasi untuk pengaruh Kompetensi Guru (X_2) terhadap Kinerja (Y) menggunakan koefisien jalur ρ_{YX_2} sebesar 0,446. Kontribusi langsung variabel ini dihitung dengan mengalikan koefisien tersebut dengan dirinya sendiri ($\rho_{YX_2} \times \rho_{YX_2}$), yang menghasilkan nilai 0,199 atau 19,9%. Selain itu, terdapat pengaruh tidak langsung melalui keterkaitannya dengan kebijakan kurikulum sebesar 0,171.

Analisis data menunjukkan bahwa kompetensi Guru memberikan dampak nyata dengan nilai t hitung sebesar 5,149 dan signifikansi 0,000. Pengaruh total kompetensi Guru terhadap kinerja adalah sebesar 0,370 atau 37%. Meskipun angka pengaruh langsungnya sedikit lebih kecil dibandingkan variabel kebijakan, kompetensi tetap menjadi faktor internal yang krusial bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas kependidikan di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya.

Kesimpulannya, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kompetensi Guru terhadap Kinerja Guru, hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas individu guru baik dari aspek pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian akan secara otomatis meningkatkan efektivitas kerja mereka. Kompetensi menjadi modal dasar agar guru mampu menerjemahkan tugas ke dalam hasil kerja yang optimal.

3. Pengaruh implementasi kebijakan dan kompetensi secara Simultan

Formulasi untuk mengetahui pengaruh variabel dalam penelitian ini menggunakan model analisis jalur (*Path Analysis*) yang didefinisikan melalui persamaan struktural: $Y = \rho_{YX_1} \cdot X_1 + \rho_{YX_2} \cdot X_2 + \varepsilon$. Berdasarkan tabel

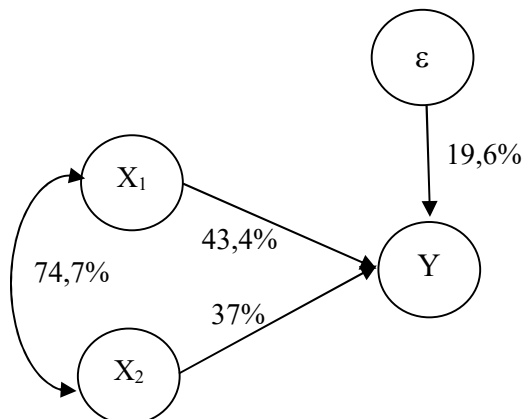
Coefficients, diperoleh nilai koefisien jalur (Beta) untuk implementasi kebijakan kurikulum (ρ_{YX_1}) sebesar 0,513 dan Kompetensi Guru (ρ_{YX_2}) sebesar 0,446. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk menghitung sejauh mana kontribusi masing-masing variabel secara mandiri maupun bersama-sama terhadap variansi kinerja guru.

Perhitungan pengaruh dibagi menjadi dua jalur utama, yakni pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung X_1 dihitung dengan mengkuadratkan koefisien jalurnya ($0,513 \times 0,513 = 0,263$), sedangkan pengaruh tidak langsungnya melalui interaksi dengan X_2 melibatkan nilai korelasi antar-variabel ($r = 0,747$). Dengan menjumlahkan kedua jenis pengaruh tersebut, ditemukan total kontribusi X_1 terhadap Y sebesar 0,434 dan kontribusi X_2 terhadap Y sebesar 0,370, yang mencerminkan struktur hubungan kausalitas dalam model tersebut.

Terakhir, perhitungan total pengaruh gabungan (R^2) dilakukan dengan menjumlahkan seluruh kontribusi langsung dan tidak langsung dari kedua variabel independen. Hasil perhitungan menunjukkan total pengaruh sebesar 0,804 atau 80,4%. Sisa pengaruh sebesar 19,6% direpresentasikan oleh nilai epsilon (ϵ), yang menunjukkan adanya faktor-faktor lain di luar model penelitian ini (seperti kepemimpinan kepala sekolah atau sarana prasarana) yang turut mempengaruhi kinerja guru di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan peroleh hasil perhitungan statistik di atas, dapat digambarkan dalam struktur jalur penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.
Struktur Jalur Penelitian



Keterangan

X_1 = Implementasi kebijakan kurikulum

X_2 = Kompetensi guru

Y = Kinerja Guru

ϵ_y = Pengaruh faktor lain

4. Hasil Analisis Data

Analisis terhadap data menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum (X_1) memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan Kompetensi Guru (X_2) dalam meningkatkan kinerja. Secara statistik, nilai signifikansi (Sig.) untuk kedua variabel adalah 0,000, yang berarti jauh di bawah ambang batas 0,05. Hal ini membuktikan bahwa baik kebijakan kurikulum maupun kompetensi guru secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan dan positif; artinya, semakin baik implementasi kurikulum dan kompetensi yang dimiliki, maka kinerja guru akan meningkat secara nyata.

Hubungan antar variabel independen juga tergolong sangat kuat, sebagaimana ditunjukkan oleh angka Pearson Correlation sebesar 0,747. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan kurikulum dan kompetensi guru saling mendukung satu sama lain (*interconnected*). Kuatnya korelasi ini menjelaskan mengapa terdapat "Pengaruh Tak Langsung" yang cukup besar (0,171) bagi kedua variabel; kebijakan yang tepat memberikan ruang bagi kompetensi guru untuk berkembang, dan sebaliknya, guru yang kompeten mampu menerjemahkan kebijakan kurikulum dengan lebih efektif.

Dilihat dari total pengaruh sebesar 80,4%, model ini memiliki tingkat akurasi dan daya penjabar yang sangat tinggi dalam konteks SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Angka ini menunjukkan bahwa faktor internal organisasi berupa kebijakan kurikulum dan kualitas individu (kompetensi) adalah kunci utama penggerak produktivitas guru. Pengaruh langsung X_1 (26,3%) yang lebih besar dari pengaruh langsung X_2 (19,9%) menegaskan bahwa sistem kerja yang diatur dalam kurikulum memberikan kerangka kerja yang lebih kuat bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Implementasi kurikulum di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya dinilai sangat berhasil dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan kearifan lokal, sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang harmonis dan bermartabat. Keberhasilan ini didorong oleh partisipasi aktif para guru yang berperan sebagai arsitek pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, serta dukungan sinergis dari Dinas Pendidikan dan staf kependidikan. Didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan struktur birokrasi yang transparan, sekolah mampu menjalankan transformasi digital dan inovasi pedagogik yang integratif tanpa mengikis nilai-nilai tradisional masyarakat setempat.

Secara substansial, kualitas pembelajaran diperkuat oleh kompetensi pedagogis dan kematangan emosional guru yang mampu memahami karakteristik unik setiap siswa melalui pendekatan diferensiasi. Guru tidak hanya menguasai materi secara mendalam dan adaptif terhadap teknologi, tetapi juga menjadi figur teladan moral yang membangun interaksi sosial efektif dengan siswa maupun orang tua. Dengan iklim organisasi yang kolaboratif dan profesional, SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya telah meletakkan fondasi kuat untuk mencetak generasi yang kompetitif secara global namun tetap memiliki jati diri yang berakar pada budaya luhur bangsa.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan kurikulum dan kompetensi guru di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya terbukti menjadi pilar utama yang secara simultan mendorong optimalisasi kinerja tenaga pendidik secara signifikan. Kebijakan kurikulum yang terintegrasi dengan kearifan lokal berfungsi sebagai instrumen penggerak yang memberikan arah operasional yang jelas, sementara kompetensi guru yang tinggi menjadi modal internal krusial dalam mewujudkan interaksi edukatif yang berkualitas. Sinergi antara sistem kebijakan yang terstruktur dengan profesionalisme individu ini menciptakan ekosistem kerja yang sangat kuat, di mana efektivitas organisasi sangat bergantung pada harmonisasi antara landasan aturan yang mendukung produktivitas dan kapasitas pedagogik guru di lapangan.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Daryanto. (2014). *Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hidayat, R. (2021). "Analisis Dampak Tunjangan Profesi terhadap Motivasi Kerja Guru". *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 145-158.
- Kunandar. (2015). *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyasa, E. (2013). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2021). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Bumi Aksara.
- Musfah, J. (2015). *Redesain Pendidikan Guru*. Jakarta: Kencana.
- Rahayu, R., dkk. (2022). "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak". *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313-6319.
- Syafi'i, A. (2023). "Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Tantangan dan Solusi". *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 22-35.
- Tilaar, H.A.R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.